



PENGARUH ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH DAERAH PADA FUNGSI PENDIDIKAN TERHADAP INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA PROVINSI PAPUA

(THE INFLUENCE OF LOCAL GOVERNMENT EXPENDITURE BUDGET ON EDUCATION FUNCTION ON THE HUMAN DEVELOPMENT INDEX IN PAPUA PROVINCE)

¹ Endius Wenda, Universitas Nusa Bangsa, Unnversitas Nusa Bangsa

² Faisal Maad, Fakultas Ekonomi Dan Bisnis, Unnversitas Nusa Bangsa

³ Lalu Solihin, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Unnversitas Nusa Bangsa

Informasi Naskah

Submitted: 10 Juni 2023

Sabtu: 14 September 2023

Accepted: 22 Desember 2023

Abstract

Economic development in the past that was oriented towards economic growth failed to achieve development goals because it was unable to reduce the problems of poverty, unemployment and inequality. The goal of development economic development is directed at human resource development as initiated by the United Nations Development Program (UNDP), namely improving the quality of human resources through improving the quality of education, health, and people's purchasing power. The data type method used in this research is secondary data which is sourced from several agencies and collected through literature studies. Expenditure in the education sector of the Papua Province fluctuates, although it shows an increasing trend. Based on the test results, it shows that the variable that has a significant positive effect on the human development index is the economy at 0.936 then the variables that have a significant negative effect are education and health spending at 0.059 and economic spending at 0.156. Based on the adjusted R-Square value of 92.7%, the diversity of the Human Development Index variables is explained by the variables in this model, namely education function spending (X1), health function spending (X2) and economic function spending (X3), while 7.3 % again explained by variables that are not included in this model.

Kata kunci :

Belanja Fungsi Pendidikan, Belanja Fungsi Kesehatan, dan Belanja Fungsi Ekonomi Provinsi Papua IPM.

Keywords :

Expenditure on the Education Function Expenditure on the Health Function and Expenditure on the Economic Function of the Papua Province IPM.

Abstrak

Pembangunan ekonomi pada masa lampau yang berorientasi kepada pertumbuhan ekonomi telah gagal mencapai tujuan pembangunan karena tidak mampu untuk mengurangi masalah kemiskinan, pengangguran dan ketimpangan. Tujuan pembangunan ekonomi pembangunan diarahkan kepada pembangunan sumber daya manusia sebagaimana yang digagas oleh United Nations Development Program (UNDP) yaitu peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, daya beli masyarakat. Metode jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang bersuber terdiri dari beberapa instansi dan dikumpulkan melalui studi literature. Belanja bidang pendidikan Provinsi papua fluktuatif, meskipun namun menunjukkan kecenderungan yang semakin meningkat. Berdasarkan hasil uji menunjukkan bahwa variabel yang berpengaruh signifikan positif terhadap indeks pembangunan manusia adalah ekonomi sebesar 0,936 kemudian variabel yang berpengaruh signifikan negatif adalah belanja pendidikan dan kesehatan sebesar 0,059 dan belanja ekonomi sebesar 0,156. Berdasarkan nilai *adjusted R- Square* sebesar 92,7 % keragaman variabel Indek Pembangunan Manusia diterangkan oleh variabel yang ada model ini, yakni belanja fungsi pendidikan (X1), belanja fungsi kesehatan (X2) dan belanja fungsi ekonomi (X3), sedangkan 7,3% lagi diterangkan oleh variabel yang tidak terdapat dalam model ini.

* Corresponding Author.

I. PENDAHULUAN

Pembangunan ekonomi pada masa lampau yang berorientasi kepada pertumbuhan ekonomi telah gagal mencapai tujuan pembangunan karena tidak mampu untuk mengurangi masalah kemiskinan, pengangguran dan ketimpangan. Belajar dari kegagalan itu, maka konsepsi pembangunan mengalami perubahan, di mana pertumbuhan ekonomi bukan lagi menjadi tujuan akhir pembangunan. Tujuan pembangunan ekonomi pembangunan diarahkan kepada pembangunan sumber daya manusia sebagaimana yang digagas oleh United Nations Development Program (UNDP) yaitu peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, daya beli masyarakat. Ukuran pembangunan manusia berdasarkan pencapaian tingkat pendidikan, kesehatan dan daya beli ini disebut dengan Human Development Index atau Indeks Pembangunan Manusia (IPM).

Sebagai salah satu indikator kinerja pembangunan nilai IPM yang tinggi menandakan keberhasilan dalam upaya membangun kualitas hidup manusia. Selain itu, IPM dapat menentukan peringkat pembangunan suatu negara atau wilayah, selanjutnya bagi Indonesia IPM juga merupakan data strategis sebagai salah satu indikator penentu besarnya dana alokasi umum (DAU). Pemerintah berupaya untuk selalu meningkatkan nilai IPM, sehingga keberadaan bangsa Indonesia bisa sejajar atau tidak tertinggal dengan keberhasilan negara-negara lain. Peningkatan IPM secara nasional di butuhkan peningkatan IPM dari setiap kabupaten yang ada di Indonesia.

Anggaran belanja dana fungsi Pendidikan di Provinsi Papua Tahun 2010-2020, dengan demikian anggaran belanja fungsi pendidikan 248,12 miliar kemudian tahun 2011 anggaran belanja fungsi pendidikan 270,68 miliar, selanjutnya tahun 2012 belanja fungsi pendidikan 291,78 miliar, kemudian selanjutnya tahun 2013 belanja fungsi pendidikan 181,77 miliar, kemudian tahun 2014 belanja fungsi pendidikan 174,84, kemudian tahun 2015 belanja fungsi pendidikan 157,95 miliar, kemudian tahun 2016 belanja fungsi pendidikan 164,26 miliar, kemudian tahun 2017 belanja fungsi pendidikan 552,45 miliar, kemudian tahun 2018 belanja fungsi pendidikan 320,50 miliar, kemudian tahun 2019 belanja fungsi pendidikan 1.406,32 miliar, kemudian tahun 2020 belanja fungsi pendidikan 1.409,08 miliar. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik Perwakilan Provinsi Papua, nilai IPM di wilayah Provinsi Papua dari tahun 2010 sampai dengan tahun 2020 mengalami peningkatan setiap tahunnya, namun selama kurun waktu tersebut, IPM rata-rata Provinsi Papua selalu berada di bawah nilai rata-rata IPM Nasional. Dengan demikian, perlu dilakukan penilaian dan analisis pengaruh anggaran belanja pemerintah daerah pada fungsi pendidikan terhadap IPM. Hasil penilaian ini dapat menjadi salah satu bahan pertimbangan dalam pembuatan kebijakan dan layanan di Propinsi Papua.

II. METODOLOGI PENELITIAN

A. Lokasi dan Waktu

Penelitian dilakukan di wilayah Provinsi Papua yaitu kantor Bappeda Kota Jayapura dan instansi terkait yang di anggap mewakili tempat ruang lingkup untuk penelitian. Dan penelitian ini berlangsung selama 6 bulan April sampai dengan bulan Oktober Tahun 2022.

B. Alat dan Bahan

Alat dan bahan yang digunakan dalam penelitian yaitu: alat tulis, laptop, kamera, kuesioner, dan literatur.

C. Metode Penelitian dan Pengambilan Sampel

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang bersuber terdiri dari beberapa instansi dan dikumpulkan melalui studi literature. Untuk mendukung ketersediaan data lainnya yang lebih lengkap, sumber data dapat dilihat pada tabel 1.

No	Jenis Data	Sumber Data
1	APBD kabupaten/kota Provinsi Papua dan realisasinya	Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK) Kementerian Keuangan

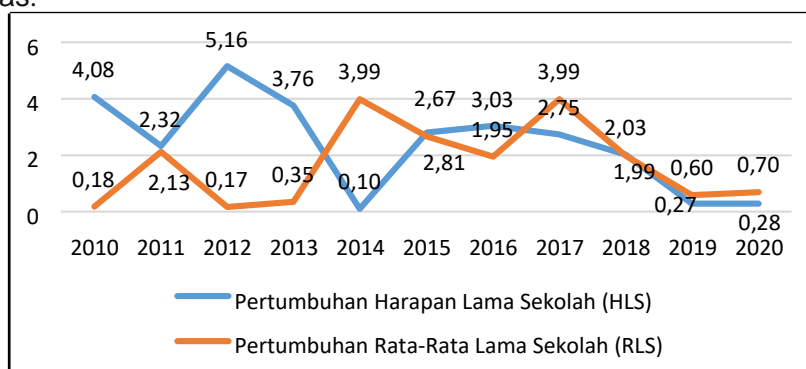
2	Indeks Pembangunan Manusia, PDRB, fungsi pendidikan, fungsi kesehatan, dan fungsi ekonomi, kabupaten/kota di Provinsi Papua	Badan Pusat Statistik
3	Opini Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)	Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)

Analisis tipologi klasen untuk pengelompokan kabupaten/kota berdasarkan capaian IPM dan tiap-tiap indeks pembentuk IPM terhadap pertumbuhannya, serta pengelompokan belanja pemerintah daerah terhadap indeks pembentuk IPM. Analisis ekonometrika untuk menganalisis pengaruh belanja fungsi pemerintah daerah terhadap indeks pembangunan manusia dan indeks pembentuk IPM di kabupaten/kota di Provinsi Papua dilakukan dengan menggunakan data panel. Data panel yang digunakan adalah time series tahun 2010 sampai tahun 2020 ($t = 2010-2020$) dan cross section dari 29 kabupaten 1 kota di Provinsi Papua ($i = 465$).

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Indeks Pendidikan

Dimensi pengetahuan pada IPM dibentuk oleh dua indikator, yaitu Harapan Lama Sekolah (HLS) penduduk usia 7 tahun ke atas dan Rata-rata Lama Sekolah (RLS) penduduk usia 25 tahun ke atas.



Gambar 1 Harapan Lama Sekolah (HLS) dan Rata-rata Lama Sekolah (RLS) Provinsi Papua, 2010-2020

Sumber : *Badan Pusat Statistik Provinsi Papua 2021*

Gambar di atas menjelaskan bahwa perkembangan harapan lama sekolah (HLS) Papua Tahun 2010-2020. umur harapan hidup saat lahir provinsi Papua tahun 2010 pertumbuhan harapan lama sekolah mencapai 4,08 dan rata-ratanya 0,18 dan tahun 2011 mencapai 2,13 dan rata-ratanya 2,32 kemudian pada tahun 2012 mencapai 5,16 dan rata-rata 0,17 kemudian pada tahun 2013 mencapai 3,76 dan rata-rata 0,35 kemudian tahun 2014 pertumbuhan 0,10 dan rata-rata 3,99 kemudian pada tahun 2015 pertumbuhan 2,81 dan rata-rata 2,67 kemudian tahun 2016 mencapai 1,95 dan rata-rata 3,03 kemudian pada tahun 2017 mencapai 2,75 dan rata-rata 3,99 kemudian pada tahun 2018 mencapai 1,99 dan rata-rata 2,03 kemudian tahun 2019 bertumbuh 0,27 dan rata-ratanya 0,60 kemudian pada tahun 2020 mencapai pertumbuhan 0,28 dan rata-ratanya 0,70. pertumbuhan harapan lama sekolah (HLS) dan pertumbuhan rata-rata lama sekolah (RLS).

1. Jumlah Sekolah, Guru dan Murid Provinsi Papua Tahun 2010-2020

Tabel 2 Jumlah Sekolah di Provinsi Papua Tahun 2010-2020

Jenjang Pendidikan	2010	2011	2012	2013	2014	2015
SD	2,914	2,316	2,316	2,431	2,431	2,323
SMP	757	757	751	522	229	258

SMA	258	258	686	453	233	232
SMK	144	141	405	273	133	166
Jumlah	4.073	3.472	4.158	3.679	3.026	2.979

2016	2017	2018	2019	2020
2,284	2,157	2,157	2,586	2,586
145	151	122	760	760
143	131	192	437	437
144	114	832	730	730
2.680	2.553	3.303	4.513	4.513

Sumber : BPS Provinsi Papua, 2022

Untuk tenaga guru di provinsi Papua, terlihat mengalami perkembangan yang pesat dengan rata-rata pertumbuhan mencapai 16.23 % pertahun. Rata-rata pertumbuhan tertinggi dicapai oleh tenaga guru SD yaitu sebesar 26.34 % yang diikuti oleh tenaga guru SMA (18.88%), SMP (16.12%) dan SMK (11.65%). sehingga rata-rata pertumbuhan dari menjadi -1,43%.

Tabel 3 Jumlah Guru di Provinsi Papua Tahun 2013-2016

Jenjang Pendidikan	2010	2011	2012	2013	2014	2015
SD	7.157	10,691	11,557	12,348	11,997	8,310
SMP	8.923	8.923	7,846	5,060	7,089	7,331
SMA	4.585	1.831	2.754	2,586	3,671	3,971
SMK	1,279	1,597	2.360	2,214	3,077	2,502
Jumlah	21.944	23.048	24.517	22,208	25,834	22,114

2016	2017	2018	2019	2020
17,667	10.139	3.745	5.319	4.585
7,687	7,687	2.876	2.360	1,361
4,230	1,956	1,394	1.663	1878
2,869	2.159	2.040	3.260	1.423
32,453	21.941	10.055	12.602	9.245

Sumber : BPS Provinsi Papua, 2022

Tabel 4 Jumlah Murid di Provinsi Papua Tahun 2010-2020

Sekolah	2010	2011	2012	2013	2014	2015
SD	336,644	391,123	402,063	399,444	382,292	412,187
SMP	19,510	19,411	18,035	106,482	101,392	115,296
SMA	47.267	21.077	68.344	49,252	48,514	53,851
SMK	21.376	14.228	1.123	25,892	26,174	25,588

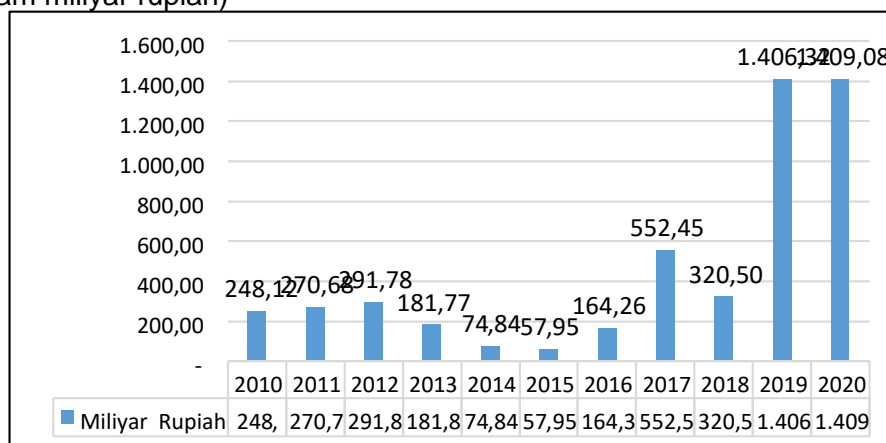
Jumlah	421.797	445.839	489.565	581,070	558,372	606,922
2016	2017	2018	2019	2020		
445,243	27.244	17.401	442.845	442.856		
123,823	56.965	15,360	15,360	347.665		
59,126	19,812	10,336	10,811	170.072		
33,144	2.655	2.992	2.728	185.213		
661,336	106.676	46.089	471.744	1.145.806		

Sumber :BPS Provinsi Papua, 2022

Pesatnya pertumbuhan pembangunan gedung sekolah dibanding perkembangan murid berdampak pada rasio sekolah murid. Rasio sekolah murid di tingkat SD tahun 2010-2020 terlihat bergerak turun dari 181 murid per sekolah menjadi 159 murid persekolah. Rasio murid SMP dan SMA dengan sekolah terlihat mengalami hal yang sama sedangkan rasio sekolah murid SMK terlihat tidak terjadi perubahan sejak tahun 2012-2014. Jumlah murid SD tahun 2012 turun dari 393.794 orang menjadi 382.292 orang tahun 2020.

2. Perkembangan Belanja Pendidikan Provinsi Papua.

Pemerintah Sulawesi Selatan telah menempatkan sektor pendidikan sebagai prioritas utama pembangunan daerah. Di dalam Rencana Pembangunan Daerah (RPJMPD) Papua Selatan tahun 2010-2020, sektor pendidikan bersama dengan sektor kesehatan menempati agenda pertama dari tujuh agenda pembangunan daerah. Untuk memastikan bahwa semua anak yang berada pada usia sekolah benar-benar duduk di bangku sekolah, pemerintah Papua sejak tahun 2010 telah mengimplementasikan kebijakan pendidikan gratis di seluruh kabupaten/kota. Bersamaan dengan itu, juga telah dikembangkan berbagai kebijakan lainnya seperti peningkatan kualitas pelayanan pendidikan, promosi pendidikan, pemberantasan buta aksara, dan pengembangan budaya baca. Hal tersebut yang kemudian jadi fokus pemerintah kabupaten Enrekang untuk meningkatkan perhatian dalam peningkatan kualitas Pendidikan, yang mana bisa dilihat dari peningkatan belanja pendidikan yang terus meningkat setiap tahunnya. (dalam miliar rupiah)



Sumber:Data BPKD Provinsi Papua 2010-2020

Gambar 2 Perkembangan Belanja Bidang Pendidikan Provinsi Papua tahun 2010-2020

Belanja bidang pendidikan Provinsi Papua cenderung fluktuatif, meskipun relatif fluktuatif namun menunjukkan kecenderungan yang semakin meningkat. Hal ini dapat dilihat dari tahun 2010-2020 angka pada belanja Pendidikan mengalami peningkatannya yang sangat signifikan

yakni dari angka sebesar 270,7 miliar meskipun pada tahun 2012 mengalami penurunan menjadi angka sebesar 291,8 miliar tapi pada tahun 2013-2018 terus mengalami peningkatan yang sangat signifikan. yakni dari angka sebesar 181,8-320,5 miliar dan tahun 2019-2020 mengalami penurunan menjadi angka sebesar 1.406-1,409 miliar.

B. Pembahasan Pengaruh Belanja fungsi Pendidikan, Kesehatan dan ekonomi terhadap IPM

Hasil uji penelitian ini menunjukkan bahwa variabel yang berpengaruh signifikan positif terhadap indeks pembangunan manusia adalah belanja pendidikan sebesar 0,886 kemudian variabel yang berpengaruh signifikan negatif adalah belanja kesehatan sebesar 0,142 dan belanja ekonomi sebesar 0,000. Berdasarkan nilai *adjusted R- Square* sebesar 97,8 % keragaman variabel Indeks Pembangunan Manusia diterangkan oleh variabel yang ada model ini, yakni belanja fungsi pendidikan (X1), belanja fungsi kesehatan (X2) dan belanja fungsi ekonomi (X3), sedangkan 2,2% lagi diterangkan oleh variabel yang tidak terdapat dalam model ini. Berdasarkan penelitian ini di dapatkan bahwa belanja pendidikan hal ini membuktikan dengan koefisien belanja pendidikan yang positif dan signifikan sebesar 8,049. Hasil penelitian ditemukan bahwa Provinsi Papua yang mempunyai tingkat belanja pendidikan sebesar (100-9,78%= 90,22%).

Hasil penelitian ini di dapatkan bahwa belanja kesehatan hal ini membuktikan dengan koefisien belanja kesehatan yang negatif dan signifikan sebesar 9,286. Hasil penelitian ditemukan bahwa Provinsi Papua yang mempunyai tingkat belanja pendidikan sebesar (100-9,78%= 90,22%).

Berdasarkan hasil uji menunjukkan bahwa variabel yang berpengaruh signifikan negatif terhadap indeks pembangunan manusia adalah belanja ekonomi sebesar 0,000 kemudian variabel yang berpengaruh signifikan negatif belanja kesehatan sebesar 0,142 dan ekonomi sebesar 0,000 dan variabel yang berpengaruh positif adalah belanja pendidikan sebesar 0,886. Berdasarkan nilai *adjusted R- Square* sebesar 0,978 dapat disimpulkan bahwa model ini dapat menyelaskan keragaman variabel dependen sebesar 9,78%.

Berdasarkan penelitian ini di dapatkan bahwa belanja kesehatan hal ini membuktikan dengan koefisien belanja kesehatan yang negatif dan signifikan sebesar 9,286. Hasil penelitian ditemukan bahwa Provinsi Papua yang mempunyai tingkat belanja pendidikan sebesar (100-9,78%= 90,22%).

Hasil ini sesuai dengan penelitian yang di lakukan oleh Lheoma CG (2014), ditemukan bahwa belanja pemerintah untuk pendidikan dasar dan menengah signifikan terhadap pembangunan manusia, karena pendanaan yang tidak memadai ditambah dengan manajemen yang buruk dari alokasi anggaran pendidikan. Struktur belanja pendidikan Kabupaten/Kota di Indonesia menunjukkan bahwa alokasi belanja lebih besar untuk pegawai sebesar 73.17 persen, artinya terjadi inefisiensi pada belanja daerah sehingga pembangunan daerah menjadi berkurang. Akibat dari inefisiensi, sumber daya manusia daerah belum mampu berkompetensi dengan baik (Mulyani S, 2019) belanja yang lebih didominasi adalah belanja pegawai dan barang-barang penunjang operasional tidak secara langsung berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi. Belanja pendidikan bersifat investasi jangka panjang sehingga dalam jangka pendek kedua variabel tersebut belum mampu mendorong pertumbuhan ekonomi.

Sesuai dengan teori pengeluaran (Adolf Wagner) yang menyatakan bahwa pengeluaran pemerintah dan kegiatan pemerintah semakin lama semakin meningkat sehingga kesejahteraan masyarakat dapat tercapai yang dapat diukur dengan IPM. Belanja pendidikan yang relatif besar dan meningkat ini memberikan kesempatan kepada Kabupaten/kota Provinsi Papua untuk membiayai pembangunan daerah khusus dibidang pendidikan yang mampu meningkatkan IPM. Secara teoritis belanja pendidikan diberikan kepada daerah dalam rangka membiayai kebutuhan dan pembangunan daerah dibidang pendidikan.

VI. KESIMPULAN

Kesimpulan

masalah, tujuan penelitian serta mengacu pada proses hasil analisis data dalam penelitian ini, maka dapat diambil berapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Anggaran belanja pendidikan berpengaruh negatif terhadap indeks pembangunan manusia Provinsi Papua sebesar 0,059 persen.
2. Anggaran Belanja kesehatan berpengaruh negatif terhadap indeks pembangunan manusia Provinsi Papua Sebesar 0,156 persen.
3. Anggaran belanja ekonomi berpengaruh positif terhadap indeks pembangunan manusia Provinsi Papua sebesar 0,936 persen.

DAFTAR PUSTAKA

- Badan Pusat Statistik. (2017). Data Nasional-Pembangunan Manusia [internet]. [diunduh 2019 Mei 04]. Tersedia pada: <https://ipm.bps.go.id/data/nasional>
- Badan Pusat Statistik. (2015). *Indeks Pembangunan Manusia 2014*. Jakarta (ID): BPS.
- Badan Pusat Statistik Provinsi Papua. (2020). Produk Domestik Regional Bruto Harga Konstan Provinsi Papua. Papua.Bps.Go.Id. [diakses pada tanggal 2 Januari 2021].
- Badan Pusat Statistik Provinsi Papua.(2019).Provinsi Papua Dalam Angka. <https://papua.bps.go.id/publication/2019/08/16/e43fc034219586add3878e48/provinsi-papua-dalam-angka2019.html> [diakses pada tanggal 2 Januari 2021]
- Ihoma CG. (2014). Impact of Social Spending on Human Development in SubSaharan Africa. *American Journal of Social Science*, 2(2): 29-35.
- Mulyani S. 2019. Lebih dari 75 persen APBD habis untuk belanja gaji dan operasional. [internet][diunduh2019Nopember25]. Tersedia pada <https://money.kompas.com/read/2019/09/18/183400726/sri-mulyani--lebihdari-75-persen-apbd-habis-untuk-belanja-gaji-dan?page=all>
- Todaro, Michael P. dan Stephen C. Smith (2011), *Pembangunan Ekonomi*. (terjemahan jilid I). Jakarta: Erlangga.